



Manajemen Strategi Dinas Pertanian Dalam Menjaga Kestabilan Pertanian Di Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi

Ulya Latifah¹⁾, Hanny Purnamasari²⁾, Ani Nurdiani Azizah³⁾

Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Singaperbangsa Karawang

16106331180208@student.unsika.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa manajemen Strategi Dinas Pertanian dalam Menjaga Kestabilan Pertanian Di kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi. Penelitian ini dilatar belakangi oleh Belum adanya Peraturan Daerah Tentang Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Bekasi. Juga Masih banyaknya alih fungsi lahan yang terjadi di Kecamatan Cibarusah, sehingga luas lahan sawah yang ada di kabupaten bekasi menurun. penelitian dilakukan menggunakan metode penelitian deskriptif, dan pendekatan kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan manajemen Strategi Dinas Pertanian dalam Menjaga Kestabilan Pertanian berdasarkan teori menggunakan teori strategi dari David (2017:3) yaitu Formulasi strategi, Implementasi strategi dan Evaluasi strategi, dengan menggunakan teori tersebut manajemen strategi yang digunakan bisa berkembang dengan menggali potensi daerah serta dapat mensejahterakan masyarakat agar tetap tercapainya kesetabilan pertanian.

Kata Kunci : Manajemen Strategi , Pertanian, Stabilitas,

Abstract

This study researcher aimed at knowing about intended to analyze the management of agriculture strategies to maintain agricultural stability in rural areas. This study is on the background of yet another regional rule on sustainable food land protection (lp2b) in cibarusah,bekasi. there still a change lot of land function in the cibarusah, So the fields of farmland in bekasi are reduced. Researcher used descriptive as an qualitative research methods. As for the resulth of the researcher that is the effective agricultural management of strategies to maintain agricultural stability based on theories using David's strategy formulations (2017:3), strategy implementation and strategy assessments, using the theory to finance the strategy could grow by extracting the region's potential and creating a sustainable sustainable community.

Keywords: strategy of management, stability, agriculture

PENDAHULUAN

Sektor pertanian merupakan sumber pendapatan masyarakat yang berperan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat dan dapat menumbuhkan peluang ekonomi masyarakat pedesaan. Sektor usaha di bidang pertanian dan atau yang terkait dengan pertanian masih didominasi oleh usaha yang selama ini dikelola secara tradisional dengan menggunakan peralatan dan teknologi sederhana. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan modal kerja dan sumberdaya manusia petani yang rata-rata masih rendah, sehingga potensi yang ada masih belum digali secara optimal. Disamping itu, pembangunan pertanian kedepan juga menghadapi banyak tantangan yang tidak mudah, antara lain bagaimana meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk dengan sistem pertanian yang ramah lingkungan, membudayakan penggunaan pupuk kimiawi dan organik secara berimbang untuk memperbaiki dan meningkatkan kesuburan tanah, memperbaiki dan membangun infrastruktur lahan dan air



serta pembenihan dan pembibitan, membuka akses pembiayaan pertanian dengan suku bunga rendah bagi petani kecil, mengupayakan pencapaian *Millenium Development Goals* (MDG's) yang mencakup angka kemiskinan, pengangguran, dan rawan pangan, menciptakan kebijakan harga (*pricing policies*) yang proporsional untuk produk-produk pertanian strategis.

Oleh karena itu pemerintah mengupayakan terciptanya laju perekonomian di seluruh Indonesia, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban memberikan perhatian terhadap situasi dan kondisi pada sektor pertanian. dimana dalam hal tersebut didukung dengan adanya landasan hukum yang mendukung agar tetap terjaganya sektor pertanian di Indonesia. Landasan-landasan hukum tersebut sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani

Namun Indonesia mengalami penurunan lahan sawah dari 8.187.734 Ha menjadi 7.105.145 Ha. Penurunan tersebut sangat signifikan hanya dalam rentang waktu 2 tahun saja yaitu pada tahun 2016-2018 (Sumber: *BPS (2014-2017) dan Kementerian ATR/BPN (2018)*). Hal tersebut terjadi karena banyaknya alih fungsi lahan yang ada di Indonesia, lahan-lahan tersebut beralih fungsi menjadi pemukiman ataupun industri yang semakin pesat pembangunannya. Provinsi Jawa barat pada tahun 2018 memiliki luas lahan sawah 930.334 Ha. Dimana Jawa barat sendiri merupakan daerah pertanian tertinggi ke tiga di Indonesia. Di Provinsi Jawa Barat sendiri sektor pertanian dapat dikatakan menjadi salah satu penggerak utama dari roda perekonomian. Hal ini dapat kita pahami karena wilayah ini mempunyai lahan pertanian yang luas serta memiliki tingkat kesuburan yang tinggi jika dibandingkan daerah lainnya. Salah satu bentuk dari pentingnya sektor pertanian di Jawa Barat adalah pada luas lahan yang tetap terjaga.

adapun Kabupaten Bekasi memiliki luas lahan sawah 59.267 ha pada tahun 2018 dari Luas wilayah mencapai 127.388 Ha. Kecamatan yang paling luas wilayahnya yaitu kecamatan Muaragembong (14.009 Ha) atau 11 % dari luas kabupaten. Lahan pertanian di Kabupaten Bekasi menyusut hingga 7 ribu hektare. Angka penyusutan lahan pertanian itu tercatat dalam delapan tahun terakhir. Kepala Bidang Tanaman Pangan di Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi, Nayu Kulsum mengatakan, angka penyusutan itu didapat setelah ditinjau dari Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bekasi yang disahkan pada tahun 2011 lalu. Luas lahan pertanian basah yang diarahkan dan ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana tercantum di Pasal 29 ayat 3 memiliki luas kurang lebih 35.244 hektar.

Lahan pertanian di Kabupaten Bekasi terus berkurang akibat aktivitas ekonomi di bidang industri dan pembangunan perumahan. Nayu menyebut alih fungsi lahan terjadi lantaran hingga saat ini Kabupaten Bekasi belum memiliki Peraturan Daerah tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). "Raperda LP2B ini sempat dibahas antara eksekutif dan legislatif pada April 2018 lalu, tapi belum ada hasilnya. Sebenarnya berapapun jadinya nanti, kami berharap jumlah luasannya pasti jadi kami bisa memproteksi lahan tersebut," paparnya.

Namun Lahan Pertanian di Bekasi Terancam Beralih Fungsi Lahan pertanian di Kabupaten Bekasi terancam beralih fungsi akibat pemerintah setempat membekukan pembahasan mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Pembekuan sementara Raperda ini, akibat adanya ketidaksesuaian data yang dimiliki eksekutif dengan fakta di lapangan.

Berdasarkan data Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bekasi, penyusutan lahan pertanian telah terlihat hingga kini. Pada RTRW, luas pertanian mencapai 48.000 hektar. Namun, setelah melalui verifikasi, hanya 28.000 hektar yang didaftarkan menjadi lahan pertanian abadi. (diakses penulis pada tanggal 24 September 2020, pukul 20:33

<https://wartakota.tribunnews.com/amp/2019/11/25/sudah-8-tahun-lahan-pertanian-di-kabupaten-bekasi-menyusut-sampai-7-hektar?page=3>)

Seorang Pengamat Tata Ruang Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna, sebut lahan pertanian di Kabupaten Bekasi terancam beralih fungsi. Menurut Yayat Supriyatna, sejumlah lahan pertanian akan dipenuhi oleh sejumlah perumahan dan industri di Kabupaten Bekasi tersebut. Hal itu diyakininya, lantaran Peraturan Daerah atau Perda Lahan Abadi untuk Pertanian di Kabupaten Bekasi tak kunjung rampung dibuat. Bahkan beberapa waktu lalu Dewan membekukan pembahasan Raperda tersebut. Sehingga Yayat Supriyatna menilai itu bisaancam lahan pertanian di wilayah Kabupaten Bekasi yang semakin masif beralih fungsi menjadi perumahan hingga industri.

Yayat menuturkan Perda lahan abadi untuk pertanian harus segera dibuat. Sebab, lahan di Kabupaten Bekasi terbilang sangat diminati karena dinilai begitu strategis, serta adanya kawasan industri yang dibangun secara terpadu. pemberlakuan lahan pertanian abadi harus didukung dengan data yang tervalidasi serta lahan yang dilengkapi dengan keterangan para pemiliknya. Lebih lanjut, Yayat menegaskan, regulasi tentang lahan abadi jangan ditunda terlalu lama. Dikhawatirkan lahan yang nantinya dijadikan pertanian abadi justru telah dimiliki pihak di luar Kabupaten Bekasi. (diakses penulis pada tanggal 24 September 2020, pukul 18.24 <https://metro.sindonews.com/read/122410/171/pembahasan-lahan-pertanian-abadi-kabupaten-bekasi-ditunda-1596524920>).

Kecamatan Cibarusah merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Bekasi. Berbatasan dengan Kecamatan Serang Baru dibagian utara, Kabupaten Bogor dibagian Barat dan selatan dan Kecamatan Bojong Mangu di bagian timur. Cibarusah memiliki jumlah penduduknya yang cukup besar yaitu 92.168 jiwa. (Sumber: kecamatan cibarusah dalam angka 2018).

Dalam rencana tata ruang Kecamatan Cibarusah dalam pasal 10 ayat (6) yaitu sebagai Wilayah Pengembangan (WP) II yaitu Bekasi bagian selatan, dengan pusat di perkotaan Sukamahi dan meliputi wilayah pelayanan Cikarang Pusat, Setu, Serang Baru, Cibarusah, dan Bojongmangu; yang dimana Arahan fungsi WP yang dimaksud dalam pasal 10 ayat (7) WP II diarahkan dengan fungsi utama pengembangan pusat pemerintahan kabupaten, industri, perumahan dan permukiman skala besar, pertanian dan pariwisata.

Tabel 1.1 Penggunaan Lahan Menurut Desa Di Kecamatan Cibarusah Tahun 2018 (Ha)

Desa	Lahan Pertanian Sawah		Lahan Pertanian Non Sawah	Lahan Non Pertanian	Jumlah
	Irigasi	Nonirigasi			
Cibarusah jaya	45	-	30	300	375
Cibarusah kota	-	10	-	211	221
Sindang mulya	20	-	-	542	562
Wibawa mulya	50	150	40	320	560
Sirnajati	102	238	117	62	519
Ridogalih	-	500	150	200	850
Ridomanah	-	250	65	160	475
Kec. Cibarusah	217	1.148	402	1.795	-

Sumber: Kecamatan Cibarusah Dalam Angka 2018

Dari Tabel 1.1 terlihat bahwa lahan sawah pertanian berada di posisi kedua setelah lahan non pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi salah satu pilar penggerak utama dari perekonomian di Kecamatan Cibarusah. Akan tetapi lahan sawah pertanian masih kalah jauh jika dibandingkan dengan lahan non pertanian. bahkan dalam dua tahun terakhir lahan sawah pertanian yang berada di Cibarusah mulai terkikis oleh adanya pembangunan lahan non pertanian seperti pembangunan permukiman dan perindustrian yang mulai banyak di kecamatan cibarusah itu sendiri Yang berarti bahwa sektor pertanian mulai



ditinggalkan, dan mulai menuju pada sektor lainnya yang dianggap lebih memberikan keuntungan.

Terjadinya alih fungsi lahan sawah yang berada di kabupaten bekasi pada kurun waktu sepuluh tahun sekitar 9.385 Ha. Sebaliknya lahan terbangun termasuk lahan industri meningkat sebanyak 11.542 Ha. Hal tersebut menyebabkan tergesernya sektor mata pencaharian penduduk dari sektor pertanian ke sektor industri, perdagangan dan jasa. Oleh karena itu Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sangat penting agar bisa menjadi acuan pemerintah agar tetap bisa terkendali dan salahsatu upaya pemerintah daerah Kabupaten Bekasi untuk mempertahankan lahan pertanian, tentunya bisa dilaksanakan dengan pengawasan agar upaya tersebut berjalan sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA).

METODE PENELITIAN

metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. metode penelitian kualitatif dilakukan secara intensif, peneliti ikut berpartisipasi di lapangan, mencatat secara teliti yang terjadi, melakukan analisis mendalam terhadap berbagai dokumen yang ditemukan di lapangan, dan membuat laporan penelitian secara rinci. Sumber Data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang telah ditetapkan sebagaimana dalam buku Sugiyono (2017:224) dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknik observasi dan wawancara. Penentuan sampel atau informan dalam penelitian kualitatif berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum dan peneliti melakukan observasi serta wawancara kepada orang-orang yang dipandang paham mengenai masalah yang diteliti. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2017:246). Mengemukakan bahwa aktivitas dalam data analisi kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, *conclusion drawing/verification*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi memiliki Visi Misi yang tercantum pada dokumen Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi yaitu VISI : Terwujudnya Kabupaten Bekasi Bersinar (Berdaya Saing, Sejahtera, Indah dan Ramah Lingkungan). MISI ke 3 (tiga) Kabupaten Bekasi: "Memantapkan perekonomian daerah melalui penguatan sektor pertanian, perindustrian, perdagangan, dan pariwisata."

Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Bekasi yang termuat dalam Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bekasi Tahun 2017 – 2022 serta mengacu kepada tugas dan fungsinya, maka Dinas Pertanian akan mendukung terlaksananya visi dan misi Bupati Bekasi terutama di misi ketiga, yaitu Memantapkan perekonomian daerah melalui penguatan sektor pertanian, perindustrian, perdagangan, dan pariwisata. Pada misi ketiga terdapat empat tujuan dengan satu tujuan yang menjadi bidang urusan pertanian dan menjadi tugas dan tanggungjawab Dinas Pertanian, yaitu meningkatkan daya saing ekonomi daerah dan meningkatkan ketahanan pangan daerah, dengan sasaran, strategi dan arah kebijakan, indikator kinerja dan program.

Disamping hal tersebut, Dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Bekasi, Dinas Pertanian juga memiliki beberapa faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Bekasi.

Tabel 1.1 Faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Bekasi.

Visi : Terwujudnya Kabupaten Bekasi Bersinar (Berdaya Saing, Sejahtera, Indah dan Ramah Lingkungan).				
No.	Misi Bupati dan Wakil Bupati	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Memantapkan perekonomian daerah melalui penguatan sektor pertanian dan peternakan	Belum optimalnya produktivitas dan kualitas hasil pertanian dan peternakan	Luas lahan pertanian terus menurun akibat alih fungsi.	1. telah dirintisnya regulasi tentang Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan (LP2B) untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian. 2. Penerapan Teknologi pertanian yang semakin berkembang 3. Peningkatan kapasitas SDM
		Belum optimalnya pemasaran hasil produksi pertanian dan peternakan	Metode pemasaran hasil pertanian yang masih bersifat tradisional dan terbatasnya akses pasar bagi petani	1. Perkembangan teknologi pengolahan hasil pertanian 2. Luasnya peluang usaha dalam bidang pertanian

Sumber Data: Renstra Dinas Pertanian 2017-2022

Berkaitan dengan Memantapkan perekonomian daerah melalui penguatan sektor pertanian dan peternakan, tidak akan dikatakan berhasil apabila salah satu daerah di dalamnya masih memiliki kerentanan risiko alih fungsi lahan yang cukup tinggi khususnya di daerah kecamatan cibarusah. Peneliti melakukan penelitian mengenai aspek ini dengan melakukan wawancara kepada informan-informan penelitian yang memiliki keterlibatan dalam Manajemen Strategi Dinas Pertanian Dalam Menjaga Kestabilan Pertanian Di Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi.

Dinas Pertanian adalah lembaga yang bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan untuk tetap menjaga lahan pertanian. dengan tujuan melindungi Luas lahan pertanian terus menurun akibat alih fungsi. masyarakat dan aset-aset daerah terhadap regulasi tentang Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan (LP2B) untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian. Dinas Pertanian senantiasa melakukan tugasnya dengan tanggap dalam melaksanakan tugas nya mulaidari menjaga hasil produksi dan menjaga lahan pertanian. Dinas Pertanian melakukan fungsinya sebagai perintis regulasi tentang Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan (LP2B) untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian yang dibantu oleh berbagai lembaga/instansi/OPD. melihat upaya untuk menjaga kestabilan pertanian tidak akan dapat dilaksanakan oleh satu lembaga saja dibutuhkan kerjasama untuk sama- sama melakukan penjagaan sektor pertanian melihat luasnya dampak dari banyaknya alih fungsi lahan.

Dengan demikian dalam menjaga kestabilan pertanian oleh dinas pertanian membutuhkan strategi yang baik sehingga mendapatkan hasil yang baik yaitu meminimalisir risiko/dampak atau bahkan dapat mencegah alih fungsi lahan. Dalam penelitian ini peneliti akan membahas tentang bagaimana Manajemen strategi dinas pertanian dalam menjaga kestabilan pertanian di kecamatan cibarusah kabupaten bekasi dengan menggunakan teori dari Fred R. David (2017). Teori ini terdiri dari 3 variabel yang mempengaruhi dalam prosesnya, variabel



yang harus dilakukan adalah formulasi atau perumusan strategi, implementasi atau pelaksanaan strategi, dan evaluasi strategi.

Aspek Formulasi Manajemen Strategi Dinas Pertanian Dalam Menjaga Kestabilan Pertanian Di Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi terdapat beberapa variabel yaitu

1. Mengembangkan Pernyataan Misi

Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Bekasi yang termuat dalam Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bekasi Tahun 2017 – 2022 serta mengacu kepada tugas dan fungsinya, maka Dinas Pertanian akan mendukung terlaksananya visi dan misi Bupati Bekasi terutama di misi ketiga, yaitu Memantapkan perekonomian daerah melalui penguatan sektor pertanian, perindustrian, perdagangan, dan pariwisata. Pada misi ketiga terdapat empat tujuan dengan satu tujuan yang menjadi bidang urusan pertanian dan menjadi tugas dan tanggungjawab Dinas Pertanian, yaitu meningkatkan daya saing ekonomi daerah dan meningkatkan ketahanan pangan daerah, dengan sasaran, strategi dan arah kebijakan, indikator kinerja dan program.

Adapun berdasarkan tujuan penataan ruang wilayah kabupaten bekasi 2011-2031 yaitu "Mewujudkan Tata Ruang Yang Dinamis Bagi Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri, Pemukiman Dan Pertanian Secara Harmonis, Didukung Insfaktuktur Yang Andal Dan Iklim Investasiyang Kondusif" salah satu strateginya jelas menyebutkan untuk mempertahankan lahan pertanian dan mengendalikan alih fungsi lahan pertanian menjadi kegiatan budidaya lainnya.

Dalam rencana tata ruang Kecamatan Cibarusah dalam pasal 10 ayat (6) yaitu sebagai Wilayah Pengembangan (WP) II yaitu Bekasi bagian selatan, dengan pusat di perkotaan Sukamahi dan meliputi wilayah pelayanan Cikarang Pusat, Setu, Serang Baru, Cibarusah, dan Bojongmangu; yang dimana Arahan fungsi WP yang dimaksud dalam pasal 10 ayat (7) WP II diarahkan dengan fungsi utama pengembangan pusat pemerintahan kabupaten, industri, perumahan dan permukiman skala besar, pertanian dan pariwisata.

Di dalam pasal 29 perda RTRW no 12 tahun 2011 dijelaskan daerah mana saja dikabupaten bekasi daerah yang menjadi kawasan pengembangan tanaman pangan, pengembangan hortikultura, pengembangan perkebunan berbicara pertanian berbicara 3 sub sektor tersebut. Dan Cibarusah mewakili sektor tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.

2. Mengidentifikasi Kekuatan dan Kelemahan Internal

Kekuatan yang ada di dalam internal dinas pertanian kabupaten bekasi yaitu semua pekerja sangat berkompeten di bidangnya dan dapat bekerja sama dengan baik, adapun Kelemahan banyaknya para penyuluh yang pensiun, sehingga penggantinya kurang dan banyak kursi ppl yang kosong dapat dikatakan SDM nya kurang. jika ini tidak segera di atasi maka tugas mereka yang kosong bisa dikaper dan hasil produksi akan berjalan dengan lancar.

3. Mengidentifikasi Peluang dan Ancaman Eksternal

Peluang jika lahan sawah masih tetap maka lahan pertanian akan tetap terjaga. bisa di lihat saat ini maraknya alih fungsi lahan di kecamatan cibarusah kabupaten bekasi, dari hasil penelitian bahwa jika pemerintah bisa menciptakan sumber air maka hasil produksi bakal meningkat. Adapun Tantangan yang ada di kecamatan cibarusah masifnya alih fungsi lahan dan ketersediaan air yang kurang, Dinas pertanian dalam menangani alih fungsi lahan masih pasif dimana banyak yang membuat permohonan ijin ke dinas pertanian, walaupun banyak pengusaha tidak dapat ijin tapi mereka tetap saja membangun perumahan dan menjalankan usahanya. Namun pemberian ijin yang di berikan oleh dinas pertanian tidak lah mudah harus tetap selektif untuk memberikan permohonan/rekomendasi ijin dan rata-rata pengusaha yang membuat permohonan ijin.

4. Menghasilkan dan Memilih Strategi

strateginya berbicara tentang pengamanan lahan artinya pertanian bekasi harus seperti sekarang luasan pertaniannya di pertahankan yang dimana dinas pertanian telah merintis



regulasi tentang Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan (LP2B) untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian dan yang kedua meningkatkan produktivitas dari hasil pertaniannya.

Aspek Implementasi Manajemen Strategi Dinas Pertanian Dalam Menjaga Kestabilan Pertanian Di Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi

1. Menetapkan Kebijakan dan Sasaran Tahunan

Dinas pertanian sudah mengusulkan beberapa daerah di kecamatan cibarusah untuk menjadi RAPERDA LP2B, sudah di rencang dan sudah masuk ke DPRD namun belum di acc oleh DPRD. Strategi Kegiatan yang udah direncanakan terus dilakukan monitoring atau evaluasi stakeholder di dinas pertanian. Dinas Pertanian pula sewaktu waktu di agendakan untuk meninjau langsung kelapangan tentang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang artinya sesuai tidak dengan yang direncanakan ada masalah atau tidak, jika ada permasalahan dilapangan langsung dikerjakan. Selain itu sasaran tahunan yang di jalankan adalah Dengan cara Menjaga kestabilan dalam menejemen kelompok, dimana kelompok masing-masing desa dengan Rencana kerja programa yang sesuai dengan struktur tanah dan kondisi di lapangan. sekurang-kurangnya penyuluhan yang dilakukan oleh para ppl minimal 1 kali dalam sebulan. untuk permasalahan yang ada di lapangan sebaik mungkin bisa cepat di atasi secara langsung oleh penyuluh. jika permasalahan sudah mulai membesar bisa langsung berkoordinasi dengan dinas pertanian.

2. Mengalokasikan Sumberdaya

Untuk alokasi sumberdaya pertanian dari pemerintah kepada masyarakat. kelompok tani mengadakan musyawarah lalu menentukan apa saja yang diperlukan kelompok tani sesuai dengan daerahnya, karena setiap daerah berbeda-beda kebutuhan baik bibit, pupuk, alat teknologi lainnya. Setiap desa memiliki penyuluh desa dimana masyarakat membutuhkan bantuan dari para penyuluh desa untuk pengajuan bantuan yang dibutuhkan. Agar bisa memenuhi kebutuhan petani yang ada di wilayah tersebut dan bisa menembangkan pertanian diwilayah masing masing. Untuk daerah cibarusah sendiri memiliki 4 penyuluh pertanian, dimana setiap 1 orang penyuluh memegang 2 desa. Hal tersebut menjadi masalah SDM yang mana seharusnya 1 orang penyuluh hanya memegang 1 desa saja.

Aspek Evaluasi Strategi Dinas Pertanian Dalam Menjaga Kestabilan Petanian Di Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi

Evaluasi strategi dilaksanakan dinas pertanian Kabupaten Bekasi monitoring stakeholder di dinas pertanian dan BPP. sewaktu waktu ada agenda untuk meninjau langsung kelapangan tentang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang artinya sesuai tidak dengan yang direncanakan ada masalah atau tidak jika ada permasalahan. Dan Ada pembuatan lkpj dinas capaian penerapan anggaran diuraikan dengan capaian target pelaksanaan dan setiap tahun di buat laporan oleh sekretariat dan menjadi bahan masukan ke pemerintah daerah. Itu menjadi bahan evaluasi dinas. Adapun Evaluasi untuk ppl yaitu ada evaluasi tahunan, disitu ppl diberi nilai bagaimana hasil kinerja mereka, selain memberi nilai evaluasi dilakukan dengan turun ke bpp untuk melihat langsung bagaimana kinerja ppl dilapangan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Manajemen Strategi Dinas Pertanian Dalam Menjaga Kestabilan Pertanian di Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi maka dapat ditarik kesimpulannya sebagai berikut:

1. Strategi formulasi dalam manajemen strategi Manajemen Strategi Dinas Pertanian Dalam Menjaga Kestabilan Pertanian di Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi, masih dikatakan belum optimal. Hal ini dibuktikan dengan dirumuskannya proses strategi penjagaan sektor pertanian yang baru dirintisnya regulasi tentang Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan (LP2B) untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian. keterlambatan regulasi ini membuat alih fungsi lahan di kecamatan cibarusah meningkat dan cukup masif.



2. Implementasi Strategi dalam manajemen strategi Manajemen Strategi Dinas Pertanian Dalam Menjaga Kestabilan Pertanian di Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi. dalam implementasinya belum optimal. Hal ini terlihat dari pelaksanaan strategi pengamanan lahan pertanian oleh dinas pertanian masih belum kuat karena belum di Acc nya RAPERDA LP2B sehingga sulit untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian di kecamatan cibarusah. Selain itu kelemahan internal yang mempengaruhi pelaksanaan penyuluhan yaitu kurangnya SDM yang bertugas di Kecamatan Cibarusah.
3. Evaluasi Strategi dalam Manajemen Strategi Dinas Pertanian Dalam Menjaga Kestabilan Pertanian di Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi belum optimal. Hal ini terlihat dari masih ditemukan kekurangan pada internal BPP sendiri seperti kurangnya personil pada BPP. Selain itu dinas pertanian Kabupaten Bekasi memonitoring stakeholder dinas pertanian dan juga BPP. Serta meninjau langsung kelapangan tentang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Dan Ada pembuatan lkpj dinas capaian penerapan anggaran yang diuraikan dengan capaian target pelaksanaan setiap tahunnya. Adapun Evaluasi untuk ppl yaitu ada evaluasi tahunan, disitu ppl diberi nilai bagaimana hasil kinerja mereka, selain memberi nilai evaluasi dilakukan dengan turun ke bpp untuk melihat langsung bagaimana kinerja ppl dilapangan .

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian diatas maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan bagi pihak- pihak yang terlibat dalam Manajemen Strategi Dinas Pertanian Dalam Menjaga Kestabilan Pertanian di Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi, yaitu:

1. Dinas Pertanian harus menambahkan Anggota Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) agar dapat segera memenuhi kursi yang kosong.
2. Dinas Pertanian harus lebih bisa mengambil keputusan yang lebih tegas pada para pengusaha agar dapat menekan alih fungsi lahan.
3. Dinas Pertanian harus menelaah dan menilai secara berkala dalam meninjau ulang pengukuran internal dan eksternal agar Dinas Pertanian dan Badan Penyuluh Pertanian (BPP) dapat menjalankan tugas dan fungsinya khususnya pada pengamanan lahan dan meningkatkan hasil Produksi Di Kecamatan Cibarusah.

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya peneliti dimudahkan dalam proses penyusunan. Terimakasih kepada Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu didalam membantu proses penyusunan usulan penelitian ini sampai dengan selesainya.

DAFTAR PUSTAKA

- David, Fred R. 2017. Manajemen Strategik Suatu Pendekatan Keunggulan Bersaing. Jakarta: Salemba Empat.
- Hasibuan, Malayu 2006. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: PT Bumi Aksara.
- Febriana, Hening. 2019 Strategi Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Di Kabupaten Tangerang. Serang
- Mustopa, Zaenil. 2011. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Kabupaten Demak. Semarang.
- Nawawi, Zaidan. 2015. Manajemen Pemerintahan. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Ndaha, Taliziduhu. 2011. Kybernology (*ilmu pemerintahan baru*). Jakarta: Rineka Cipta
- Rivai, Abdul dan Prawironegoro. 2014. Manajemen Strategi. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi Periode 2017 – 2022
- Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi Tahun 2020



- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani
- <https://wartakota.tribunnews.com/amp/2019/11/25/sudah-8-tahun-lahan-pertanian-di-kabupaten-bekasi-menyusut-sampai-7-hektar?page=3> (diakses penulis pada tanggal 24 September 2020, pukul 20:33)
- <https://wartakota.tribunnews.com/amp/2019/11/26/pengamat-sebut-lahan-pertanian-di-kabupaten-bekasi-terancam-alih-fungsi-jadi-perumahan-dan-industri?page=all> (diakses penulis pada tanggal 24 September 2020, pukul 21:55)
- <https://metro.sindonews.com/read/122410/171/pembahasan-lahan-pertanian-abadi-kabupaten-bekasi-ditunda-1596524920> (diakses penulis pada tanggal 25 September 2020, pukul 09:45)
- Brainly. Pengertian Stabilitas. <https://brainly.co.id/tugas/8524918#readmore> (diakses pada 30 November 2019)
- Statistik Lahan Pertanian Tahun 2014-2018 Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal – Kementerian Pertanian
- Kabupaten Bekasi Dalam Angka 2018 Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi (BPS)
- Kecamatan Cibarusah Dalam Angka 2018 Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi (BPS)